

INTISARI

Konflik di kawasan Laut Cina Selatan belum menemukan titik terangnya sampai sekarang, sehingga perlu diperhatikan oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam upaya pengelolaan penyelesaian konflik territorial di Laut Cina Selatan dilakukan dengan lokakarya-lokakarya (*Track I Diplomacy*) kemudian dari tingkat informal dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara pemerintah yang dikenal dengan negosiasi formal (*Track I Diplomacy*).

Dalam negosiasi informal (*Track II Diplomacy*) yang dihadiri oleh institusi-institusi perwakilan dari tiap-tiap negara yang mengklaim ataupun secara personal yang tertarik untuk meneliti kasus tersebut telah berjalan dengan baik dan menghasilkan kelompok-kelompok kerja yang bersangkutan. Kemudian diadakan pula negosiasi formal yakni yang dihadiri oleh pemerintah-pemerintah dari negara-negara yang bertikai termasuk Cina dan Taiwan, Amerika, Jepang, dan Rusia. Negosiasi informal lebih dinyatakan berhasil karena telah berjalan dari tahun 1990 sampai dengan 2012, namun belum menemukan hasil yang signifikan dalam penyelesaian konflik territorial ini. Hal ini dikarenakan perilaku Cina dan negara-negara pengklaim yang melanggar persetujuan dari DCO (*Declaration on the Conduct Parties in the South China Sea*), kemudian ASEAN mengusulkan agar segera dibentuk/disusun kode etik (*COC, Code of Conduct*) yang akan digunakan sebagai aturan berperilaku yang harus ditaati karena lebih bersifat tegas dan lebih taat hukum.